



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal
31 DESEMBER 2021

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Rekapitulasi Anggaran, Laporan Penyerapan Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Malang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 60/PMK.02/2021 tentang Standart Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022, Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0343/BAWASLU.SJ/KU.00.03/VI/20-19 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 revisi ke-01 Nomor : SP DIPA – 115.01.2.6886349/2022 tanggal 9 Desember 2021 dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan secara sederhana dan mudah dipahami sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Malang. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

Malang, 31 Desember 2021
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG**
Koordinator Sekretariat,

RINI PUJI ASTUTI, S.Sos., MM
NIP. 19670822 198801 2 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REKAPITULASI ANGGARAN

Laporan Rekapitulasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup Belanja selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2021 tidak ada karena Bawaslu Kabupaten Malang masih belum satker dan masih bersifat *Ad- Hoc*.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar **Rp 1.551.318.000,-** atau mencapai **94 persen** dari alokasi anggaran sebesar **Rp 1.467.060.620,-**

Secara rinci pos belanja yang telah dilaksanakan dapat dicermati dalam table di bawah ini:

Dalam table di bawah berisi 3 pos belanja yang dirinci pagu, realisasi dan persentase penyerapan.

TABEL REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BAWASLU KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2021				
NO	Uraian	Pagu Anggaran 2021	Realisasi Anggaran 2021	%
	Belanja Pegawai	Rp. 731.559.000	Rp. 712.093.000	97,3
	Belanja Barang	Rp. 819.759.000	Rp. 754.967.620	92,1
	Belanja Modal			
	Jumlah	Rp. 1.551.318.000	Rp. 1.467.060.620	94

2. LAPORAN PENYERAPAN ANGGARAN

Laporan Penyerapan Anggaran menyajikan berbagai komponen, program kegiatan, rincian besaran perencanaan, realisasi dan persentase penyerapan anggaran.

Laporan keuangan periode 1 januari sampai dengan 31 Desember 2021 dapat disajikan berdasarkan output kegiatan sebagai berikut :

- Laporan Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses adalah sebesar Rp. 17.489.644,- atau 77,4%
- Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu adalah sebesar Rp. 29.528.134,- atau 72%

- c) Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal adalah sebesar Rp. 4.026.500,- atau 48,4%
- d) Layanan Umum adalah sebesar Rp. 9.260.000,- atau 80,2%
- e) Layanan SDM adalah sebesar Rp. 6.289.000,- atau 79,4%
- f) Layanan Hukum adalah sebesar Rp. 24.392.206,- atau 95,2%
- g) Pengelolaan Kehumasan adalah sebesar Rp. 5.351.054,- atau 63,4%.
- h) Pengelolaan Data dan Informasi adalah sebesar Rp. 6.625.820,- atau 77,4%
- i) Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal adalah sebesar Rp. 4.274.500,- atau 56,8%
- j) Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal adalah sebesar Rp. 5.780.300,- atau 48,6%
- k) Layanan Perkantoran adalah sebesar Rp. 1.354.043.462 atau 96,9%

Secara rinci komponen kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dicermati dalam table di bawah ini :

Dalam table di bawah berisi 16 komponen kegiatan yang dirinci jumlah pagu, jumlah realisasi dan persentase penyerapan

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ AKUN/ RINCIAN BELANJA	TOTAL	JUMLAH KUMULATIF	PRESENTASI (%)
SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN MALANG		1.551.318.000	1.467.060.620	94%
115.CQ	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI	153.473.000	113.017.158	74%
5245	TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU OLEH BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA SERTA LEMBAGA PENGAWAS PEMILU AD-HOC	153.473.000	113.017.158	74%
BAH	Pelayanan Publik Lainnya	22.600.000	17.489.644	77%
002	Laporan Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Kabupaten/Kota	22.600.000	17.489.644	77%
051	Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan, Penindakan Pelanggaran	12.820.000	11.837.144	92%
052	Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan	9.780.000	5.652.500	58%
BKC	Pemantauan Lembaga	41.030.000	29.528.134	72%
002	Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota	41.030.000	29.528.134	72%
051	Pengawasan Pemilu Partisipatif	16.810.000	15.435.810	92%
052	Pembinaan/ Penyelenggaraan Pengawasan dan Supervisi Pengawasan Pemilu/Pemilihan	3.690.000	-	0%
053	Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu/Pemilihan	6.190.000	2.891.800	47%

054	Fasilitasi, Koordinasi, dan Pelaporan Bawaslu Provinsi	8.240.000	6.862.724	83%
055	Evaluasi pengawasan pemilu/pemilihan	6.100.000	4.337.800	71%
EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	8.325.000	4.026.500	48%
002	Bawaslu Kabupaten/Kota	8.325.000	4.026.500	48%
051	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	8.325.000	4.026.500	48%
EAC	Layanan Umum	11.550.000	9.260.000	80%
002	Bawaslu Kabupaten/Kota	11.550.000	9.260.000	80%
051	Pengelolaan BMN	5.120.000	3.980.000	78%
052	Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan	6.430.000	5.280.000	82%
EAF	Layanan SDM	7.925.000	6.289.000	79%
002	Bawaslu Kabupaten/Kota	7.925.000	6.289.000	79%
051	Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan	7.925.000	6.289.000	79%
EAG	Layanan Hukum	25.625.000	24.392.206	95%
002	Layanan Hukum Bawaslu Kab/Kota	25.625.000	24.392.206	95%
051	Advokasi Pelanggaran dan Pidana Pemilu/Pemilihan	25.625.000	24.392.206	95%
EAI	Layanan Kehumasan dan Protokol	8.440.000	5.351.054	63%
002	Pengelolaan Kehumasan Bawaslu Kabupaten/Kota	8.440.000	5.351.054	63%
051	Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi	8.440.000	5.351.054	63%
EAJ	Layanan Data dan Informasi	8.560.000	6.625.820	77%
002	Pengelolaan Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten/Kota	8.560.000	6.625.820	77%
051	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik	8.560.000	6.625.820	77%
EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	7.525.000	4.274.500	57%
002	Bawaslu Kabupaten/Kota	7.525.000	4.274.500	57%
051	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program	7.525.000	4.274.500	57%
EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	11.893.000	5.780.300	49%
002	Bawaslu Kabupaten/Kota	11.893.000	5.780.300	49%
051	Pengelolaan Administrasi Keuangan	11.893.000	5.780.300	49%
115.WA	Program Dukungan Manajemen	1.397.845.000	1.354.043.462	97%
4352	Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset	1.397.845.000	1.354.043.462	97%
EAA	Layanan Perkantoran	1.397.845.000	1.354.043.462	97%
003	Bawaslu Kabupaten/Kota	1.397.845.000	1.354.043.462	97%
001	Gaji dan Tunjangan	731.559.000	712.093.000	97%
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	666.286.000	641.950.462	96%